



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA**

**(APBdesa)**

**TAHUN 2026**



**DESA BANJARSARI  
KECAMATAN BUDURAN  
KABUPATEN SIDOARJO**



**KEPALA DESA BANJARSARI  
KABUPATEN/KOTA SIDOARJO**

**RANCANGAN PERATURAN DESA BANJARSARI  
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BANJARSARI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip ketertamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan menuju Masyarakat adil, Makmur dan Sejahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Meogulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
5. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);

19. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun

- 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyuluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyuluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
27. Peraturan Desa 04 Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Desa Banjarsari;
28. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2019 Nomor 03);
29. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2026;
30. Peraturan Desa banjarsari Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Banjarsari tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**DADAN PEMUSYAWARATAN DESA BANJARBARU**  
Dan  
**KEPALA DESA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2026.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BANJARBARU Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.977.240.278,00
2. Belanja Desa	Rp	2.009.684.727,20
Surplus/Defisit	Rp	(32.444.449,20)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	186.444.449,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	154.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	32.444.449,20
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meruut:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyerahan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BANJARSARI.

Ditetapkan di : Banjarsari

Pada tanggal : 31 Desember 2025

  
KEPALA DESA BANJARSARI  
MUHAMMAD NIDLOMUDDIN

Diundangkan di : Banjarsari

Pada tanggal : 31 Desember 2025

  
SEKRETARIS DESA  
ANITA DWI FATMAWATI

LEMBARAN DESA BANJARSARI NOMOR 06 TAHUN 2025.



KEPALA DESA BANJARSARI  
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO  
PERATURAN KEPALA DESA BANJARSARI  
NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARSARI  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARSARI

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6963);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan Pencerningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 09 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 560);
21. Surat Edaran Bersama menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-02/MK.08/2025 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.3/9692/BJ/2025 tentang Penjelasan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 104);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Ruang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 50);
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang sah bagi kepala Desa dan Perangkat Desa di kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
33. Peraturan Desa 04 Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan (jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Desa Banjarsari;
34. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2019 Nomor 03);
35. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2026;
36. Peraturan Desa banjarsari Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Banjarsari tahun 2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARSARI TAHUN ANGGARAN 2026

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 255.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.722.240.278,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.977.240.278,00

## 2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.196.992.561,20
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 500.705.417,00
c. Bidang Peningkatan Masyarakat Desa	Rp. 149.385.134,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 28.650.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Kedarifan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 133.861.615,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.009.684.727,20
Surplus/Defisit	Rp. (32.444.449,20)

## 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 186.444.449,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 154.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 32.444.449,20
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjarsari.

Ditetapkan di : Desa Banjarsari

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA BANJARSARI



NIDLOMUDDIN

Diundangkan di Desa Banjarsari

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKERTARIS DESA



ASNITA DWI FATMAWATI

BERITA DESA BANJARSARI TAHUN 2025 NOMOR 07

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA BANJARSARI KECAMATAN BUDURAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal 31 (Tiga Satu) bulan Desember tahun 2025 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD NIDLOMUDIN, S.Pd : Kepala Desa Banjarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banjarsari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. ABDUL LATIF  
SITI SHOLIKAH : Ketua BPD Desa Banjarsari  
Wakil Ketua BPD Desa Banjarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Banjarsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian APBDesa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan koreksi atas perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada berita acara ini.

selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Buduran untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa  
  
  
**MUHAIMAD NIDLOMUDIN, S.Pd**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Ketua,  
  
  
**ABDUL LATIF**

**BERITA ACARA RAPAT**  
**PENETAPAN PERATURAN DESA BANJARSARI TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**(APBDesa)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Sehubungan dengan penyempurnaan penetapan Peraturan Desa Banjarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 Desa Banjarsari Kecamatan Bahoran Kabupaten Sidoarjo.

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2025 yang bertempat di balai desa Banjarsari kecamatan bahoran kabupaten sidoarjo telah diadakan rapat yang dihadiri oleh kepala Desa Banjarsari beserta perangkat, Ketua WPD beserta Anggota (Daftar hadir terlampir).

Dari hasil keputusan rapat telah disepakati bahwa rapat tersebut/jika rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Desa Banjarsari ditetapkan menjadi Peraturan Desa Banjarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarsari, 31 Desember 2025

Pengantar Rapat  
  
ABDUL LATIF

Nututir Rapat/Sekdes

  
ANITTA DWI E.

Mengantarkan  
Banjarsari  
  
MULIAHATI SUPLOMUDDIN, S.Pd

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA BANJARSARI KECAMATAN BUDURAN**  
Jln Kh. Subakir no. 06 RT 07 RW 02, Desa Banjarsari ,  
Kecamatan Buduran 61252

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARSARI**  
Nomor : 06 Tahun 2025

**TENTANG**  
**KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBDesa**  
**TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN**  
**DESA BANJARSARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa perlu mendapat persetujuan Bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka dari itu dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap penetapan Peraturan Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 dimaksud dengan persetujuan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banjarsari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dana desa tahun anggaran 2025.
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892).
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000).
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61).
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015).
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10).
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48).

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
14. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Mirah Putih;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

19. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Desa Banjarsari;
20. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Desa Banjarsari;
21. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2019 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2026;
23. Peraturan Desa banjarsari Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa Banjarsari tahun 2026;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna BPD Desa Banjarsari pada Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Persetujuan terhadap Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Persetujuan terhadap Peratuan Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025 untuk diterapkan menjadi Peratuan Desa.

KEDUA	7	Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut: I. Pendapatan Desa : Rp. 1.977.240.278,00 II. Belanja Desa : Rp. 2.009.684.727,00 III. Pembayaran : Rp. 32.444.449,00
-------	---	---

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarsari

Pada Tanggal : 31 Desember 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**KETUA**



**ABDUL LATIF**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BANGJARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Jenis APBDDes : DRAFT ANKL

KODE REA	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1	Pendapatan Asli Desa	210.000.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.722.240.270,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.932.240.270,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1	Belanja Pegawai	717.800.000,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	707.307.340,20	
5.3	Belanja Modal	450.815.770,00	
5.4	Belanja Tidak Tersebut	133.301.015,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.009.224.125,20</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(77.444.445,20)</b>	
<b>6.</b>	<b>PENDAYAAN</b>		
6.1	Pembinaan/Pendayaaan	180.444.445,20	
6.1.1	SELPA Takut Selamatkanya	180.444.445,20	
6.2	Pengeluaran Pendayaaan	154.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	154.000.000,00	
	<b>PENDAYAAN NETTO</b>	<b>22.444.445,20</b>	
	<b>SISA LEHBIH PENDAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

21 December 2019  
 KEPALA DESA  
 BANGJARAN  
 MUHAMMAD NELONUDDIN, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BANJARAH  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	250.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.723.295.279,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.973.295.279,00</b>	
	<b>6.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>SIDANG PENYELENDINGAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.196.892.861,20</b>	
1.1		Penyelenggaraan Bidang Siskap, Tarbiyah dan Operasional Pemerintahan Desa	834.827.791,20	
1.1.01		Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.426.000,00	400
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	68.426.000,00	
1.1.02		Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.000.000,00	400
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	390.000.000,00	
1.1.04		Persediaan Operasional Pemerintah Desa (KTY, Honor PKPKD dan PPKD II)	174.251.496,20	DLL, PDB
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	174.251.496,20	
1.1.05		Persediaan Tunjangan BPD	40.000.000,00	PDB
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
1.1.06		Persediaan Commodity BPD (Bapak, ATE, Makan Minum, Pakaian Beragam, Laba II)	13.075.000,00	PDB
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.075.000,00	
1.1.07		Persediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.401.325,00	PDB
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.401.325,00	
1.1.08		Persediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.500.000,00	DDB
1.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
1.1.09		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Keluasan Ruang Mekar Kemudi Desa	21.600.000,00	PDB
1.1.09	5.1	Belanja Pegawai	21.600.000,00	
1.1.09		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Keluasan Ruang Mekar Perangkat Desa	187.200.000,00	PDB
1.1.09	5.1	Belanja Pegawai	187.200.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	86.426.770,00	
1.2.01		Persediaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan/Pemerintahan	86.426.770,00	PDB, PDB
1.2.01	5.1	Belanja Modal	86.426.770,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penelitian Sosial (Riset Tesis) Pelaksanaan Pemerintahan Desa (DTP, RANPDR, ds)	8.000.000,00	DAU
1.2.01	3.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.		Pengadaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kependudukan	1.200.000,00	
1.3.01		Penyusunan Administrasi/Uraian dan Kependudukan	1.200.000,00	DAU
1.3.01	3.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Peningenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Pemerintahan, Keuangan dan Pelayanan	23.830.000,00	
1.4.01		Peninggnaan Masyarakat, Pemerintahan Desa/Pembinaan APSCDes (Reguler)	7.050.000,00	DAU
1.4.01	3.2	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
1.4.02		Peninggnaan Masyarakat Desa Lainnya (Musaba, Rombug Desa Non Reguler)	4.500.000,00	DAU
1.4.02	3.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.03		Pengurusan Dokumen Pemerintahan Desa (RP, RDesa/RKDDes (R)	1.000.000,00	DAU
1.4.03	3.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Pengurusan Dokumen Keuangan Desa (APSCDes, APSCDes Perubahan, LRA ds)	2.000.000,00	DAU
1.4.04	3.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.10		Dukungin Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkada, Pemilihan dan Pemilihan Perangkat Desa, dan Pemilu	8.150.000,00	DAU
1.4.10	3.2	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
1.4.11		Peninggnaan Lomba atau Kompetisi & Pengiriman Kandang Selain Mengikuti Lomba Desa	12.700.000,00	DAU
1.4.11	3.2	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
1.4.92		Dukungin Pengoperasian Perangkat Desa	4.000.000,00	DAU
1.4.92	3.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	121.875.000,00	
1.5.07		Pembinaan/Pengawasan Subsektor Tanah Khas Desa	10.000.000,00	DAU
1.5.07	3.2	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.80		Belanja Jasa Pengurusan (JasPajak Asas Desa/Pajak TKD)	10.000.000,00	DAU
1.5.80	3.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.81		Optimisasi Perangkat Pajak Daerah dan Pajakul Daerah	98.075.000,00	DAU
1.5.81	3.2	Belanja Barang dan Jasa	98.075.000,00	
<b>2</b>		<b>REANO PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>88.735.417,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.910.000,00	
2.1.01		Peninggnaan PAUD/TK/PAUD/TPQ/Madrasah Non-Formal MIK Desa (Pemas, Pemas ds)	20.910.000,00	DAU
2.1.01	3.2	Belanja Barang dan Jasa	20.910.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	188.129.417,00	
2.2.01		Peninggnaan Penyuluhan (Materai, Tambahan, Koba Bunk, Lemak, Hse ds)	48.000.000,00	DAU
2.2.01	3.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
2.2.03		Penyediaan dan Pratiplan Bidang Kesehatan (Jasa Masyarakat, Tenaga ds n Kادر Kesehatan ds)	12.720.000,00	DAU

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	BUNDESDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.730.000,00	
2.2.04		Pembelenggaraan Desa Suka Kencana	40.025.000,00	000
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	40.025.000,00	
2.2.05		Pengadaan Busana atau Baju Karyawati (BKS)	4.799.417,00	000, PBN
2.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.799.417,00	
2.2.07		Pendanaan dan Pengeluaran Upaya Kesehatan Tradisional	1.075.000,00	000
2.2.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	
2.2.07	5.1	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.08		Pembelenggaraan Sertifikat Desa	15.000.000,00	000
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.5		<b>Sub Bidang Pelayanan Urusan dan Perawatan Ruang</b>	<b>236.776.880,00</b>	
2.3.01		Pembinaan Jalan Desa	120.300.000,00	000, PBN
2.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.01	5.1	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.3.05		Pembinaan Prasarana Jalan Desa (Dorong-porong/Sekeloa/Pada/Chalok + B)	60.200.000,00	000, PBN
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.05	5.1	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengasaan Jalan Desa (*)	10.000.000,00	000, PBN
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000,00	
2.3.10	5.1	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengasaan Jalan Desa Tertentu (*)	65.394.500,00	000, PBN
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.12	5.1	Belanja Modal	65.144.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas M&M Desa (Sua Benda) Arah	28.232.000,00	PBN, PBN
2.3.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.3.15	5.1	Belanja Modal	28.132.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemeliharaan Peta Wilayah dan Benda Desa (*)	4.900.000,00	000
2.3.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Perumahan</b>	<b>13.000.000,00</b>	
2.4.05		Pembinaan Sertifikat Perumahan (Dorong-porong, Sertifikat, Pendaftaran Perumahan Jalan)	10.000.000,00	000, PBN
2.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000,00	
2.4.05	5.1	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PERUMAHAN KEMENTERANGAN</u></b>	<b>140.265.134,00</b>	
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>44.370.134,00</b>	
3.2.01		Pembelenggaraan Festival Keagamaan, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT III, Daya Keagamaan B)	36.370.134,00	PBN
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.370.134,00	
3.2.01		Jasa Pelajar Maken/Maka (Honorarium)	28.200.000,00	PBN
3.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Keperawatan dan Olahraga	10.625.000,00	
3.3.05		Pembelian Barang Tahun/Kala Keperawatan/Olahraga Tingkat Desa	10.625.000,00	005 PPH
3.3.05	3.2	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	
3.4.		Sub Bidang Ketenagakerjaan Masyarakat	39.230.000,00	
3.4.03		Pembelian PKB	39.175.000,00	PAD
3.4.03	3.2	Belanja Barang dan Jasa	39.175.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	39.075.000,00	005
3.4.04	3.2	Belanja Barang dan Jasa	39.075.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>20.430.000,00</b>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PSH
4.3.01	3.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PSH
4.3.02	3.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	PSH
4.3.03	3.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Dukungan Pemasaran Modal	4.630.000,00	
4.5.02		Pelatihan Pengabdian BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.630.000,00	005
4.5.02	3.2	Belanja Barang dan Jasa	4.630.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan Fasilitas Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.000.000,00	PSH
4.7.04	3.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>133.861.818,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Peningkatan Berencana	18.661.818,00	
5.1.00		Kegiatan Peningkatan Berencana	18.661.818,00	005
5.1.00	3.4	Belanja Tidak Terduga	18.661.818,00	
5.3.		Sub Bidang Kesiapan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Peningkatan Kesiapan Mendesak	115.200.000,00	005
5.3.00	3.4	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.204.684.727,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(32.444.449,20)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBAYARAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembayaran	186.444.449,20	
6.2.		Pengeluaran Pembayaran	154.000.000,00	
		<b>PEMBAYARAN NETTO</b>	<b>32.444.449,20</b>	

KODE PERENCANA		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		BISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BANJARSARI  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1	Pendapatan Asli Desa			285.000.000,00	
	4.1.2	Hasil Asli Desa			45.000.000,00	
	4.1.2.01	Penghasilan Tanah Kas Desa			55.000.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios MKK Desa			10.000.000,00	
	4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			210.000.000,00	
	4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			210.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer			1.722.240.378,00	
	4.2.1	Dana Desa			769.564.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			769.564.000,00	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			501.501.325,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			501.501.325,00	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa			451.174.953,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			451.174.953,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain			0,00	
	4.3.6	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.977.240.378,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
01		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			1.198.892.961,20	
01.01					934.827.791,20	

KODE KEKAWIG		URAIAN	SAL DARA OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
Pembekalan Balanja Bilya, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
1.01.01.		Pembekalan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	100	Persen	66.400.000,00	ADD	
1.01.01.	5.1	Belanja Pegawai			66.400.000,00		
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			66.400.000,00		
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			6.400.000,00		
1.01.02.		Pembekalan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100	Persen	390.600.000,00	ADD	
1.01.02.	5.1	Belanja Pegawai			390.600.000,00		
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			390.600.000,00		
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			354.900.000,00		
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			35.600.000,00		
1.01.04.		Pembekalan Operasional Pemerintahan Desa (RTK, Honor PKPD dan PKPD dll)	100	Persen	174.381.488,20	DLL, PSH	
1.01.04.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			174.381.488,20		
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan			43.881.488,20		
1.01.04.	5.2.1.21	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12.000.000,00		
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Peralengkapan Alat-alat Listrik			2.500.000,00		
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Peralengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebun/Perikanan			3.781.488,20		
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Ulang Tabung Perikanan/Kebun/Perikanan			6.900.000,00		
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00		
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Benda/Unit untuk Transportasi			3.000.000,00		
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Pakan Dried/Sejagen/Pluit			6.600.000,00		
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Pemeliharaan			72.500.000,00		
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Hewan/Ternak Tim Pelaksanaan Kegiatan			42.000.000,00		
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Hewan/Ternak Tim Pelaksanaan Desa			27.600.000,00		
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Hewan/Ternak Tim PKPD dan PKPD			12.400.000,00		
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			27.500.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			12.500.000,00		
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			15.000.000,00		
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Parkir/otomob			18.000.000,00		
1.01.04.	5.2.E.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			9.500.000,00		
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			8.400.000,00		
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Pertahanan lainnya			0,00		
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			13.000.000,00		
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			7.000.000,00		
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Perlatan			6.000.000,00		
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	100	Persen	49.800.000,00	PDH	
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			49.800.000,00		
1.01.05.	5.1.A.	Tunjangan BPD			49.800.000,00		
1.01.05.	5.1.A.01	Tunjangan Keikututan BPD			49.800.000,00		
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (Hapat, ATK, Makan Minum, Pakaiac Saragam, Listrik dll)	100	Persen	13.075.000,00	PDH	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.075.000,00		
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			13.075.000,00		
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.250.000,00		
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.825.000,00		
1.01.07.		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	100	Persen	6.401.325,00	PDH	
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.401.325,00		
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			5.551.325,00		
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			501.325,00		
1.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00		
1.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00		
1.01.07.	5.2.1.08	Belanja Benda/Alat/Alat-alat/Spanduk			150.000,00		
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			150.000,00		

KODE SEKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			182.000,00	
1.01.07.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			500.000,00	
1.01.07.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pemukiman / Pengambilan Sampah / Pengul			500.000,00	
1.01.08.		<b>Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	100	Persen	21.500.000,00	DOD
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.500.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			21.500.000,00	
1.01.08.	5.2.1.00	Belanja Pembelian Kebutuhan Adat/Kebudayaan/Kesegamaan (Ritual Desa / N			21.500.000,00	
1.01.08.		<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Pemangku Kebutuhan/Mang Makan Kepala Desa</b>	100	Persen	21.800.000,00	PAD
1.01.08.	5.1.	Belanja Pegawai			21.800.000,00	
1.01.08.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			21.800.000,00	
1.01.08.	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			21.800.000,00	
1.01.81.		<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Pemangku Kebutuhan/Mang Makan Perangkat Desa</b>	100	Persen	187.200.000,00	PAD
1.01.81.	5.1.	Belanja Pegawai			187.200.000,00	
1.01.81.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			187.200.000,00	
1.01.81.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			187.200.000,00	
01.02.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			89.839.770,00	
1.03.01.		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	100	Persen	89.839.770,00	PAD, PSH
1.02.91.	5.3.	Belanja Modal			89.839.770,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Perabotan, Mebel dan Alat Berat			89.839.770,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Perabotan Elektronik dan Alat Studio			56.839.770,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Perabotan Meubel dan Akseors Ruang			33.000.000,00	
1.02.81.		<b>Penyelenggaraan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service:STOK:BPKBodit)</b>	100	Persen	9.500.000,00	PAD
1.02.81.	6.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.500.000,00	
1.02.81.	6.2.5.	Belanja Operasional Perawatan			2.500.000,00	
1.02.81.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perawatan (JrvPajak			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARANG/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.	5.2.0.	Belanja Pemeliharaan			7.500.000,00	
1.02.01.	5.2.0.00	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi)			7.500.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistis dan Kependudukan			1.300.000,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	100	Persen	1.300.000,00	PDH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.300.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.300.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bonds Pos			300.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Ruang Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan			20.650.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Masyarakat Perencanaan Desa/Pemilahan AP/Des (Reguler)	100	Persen	7.850.000,00	PDH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.850.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			6.650.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.700.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Symbol			150.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.300.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Nonwibnet			750.000,00	
1.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			200.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Masyarakat Desa Lainnya (Musdas, Reeling desa Non Reguler)	100	Persen	4.800.000,00	PDH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			4.500.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	100	Persen	1.050.000,00	PDH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.050.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.00	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LRU dll)	100	Persen	3.800.000,00	PDH
1.04.04.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			3.800.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.800.000,00	
1.04.04.	5.2.1.00	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.800.000,00	
1.04.10.		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Filibates, Penyaringan dan Penjurangan Perangkat Desa, dan Pemilih	100	Persen	6.150.000,00	PDH
1.04.10.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			6.150.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.725.000,00	
1.04.10.	5.2.1.00	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.575.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.650.000,00	
1.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pejabat			700.000,00	
1.04.10.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			500.000,00	
1.04.10.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pelaksana / Pengabdian Sampah / Pengul			750.000,00	
1.04.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			375.000,00	
1.04.10.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			375.000,00	
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kelurahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	100	Persen	12.700.000,00	PDH
1.04.11.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			12.700.000,00	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.200.000,00	
1.04.11.	5.2.1.00	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.900.000,00	
1.04.11.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
1.04.11.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.11.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
1.04.11.	5.2.2.00	Belanja Jasa Honorarium Juri Lomba			1.500.000,00	
1.04.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat			7.000.000,00	
1.04.11.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			7.000.000,00	
1.04.92.		<b>Dukungan Peningkatan Perangkat Desa</b>	2		4.800.000,00	PSH
1.04.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
1.04.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			3.050.000,00	
1.04.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.900.000,00	
1.04.92.	5.2.1.08	Belanja Kendara/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.250.000,00	
1.04.92.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			500.000,00	
1.04.92.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			300.000,00	
1.04.92.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pembantu / Pengambilan Sampah / Pengul			400.000,00	
1.04.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			300.000,00	
1.04.92.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perlatan/Perengkapan			300.000,00	
01.05.		<b>Sub Bidang Pertanian</b>			121.875.000,00	
1.05.07.		<b>Penentuan/Penegakan Batas/patok Tanah Kas Desa</b>	100	Persen	10.000.000,00	PSH
1.05.07.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
1.05.07.	5.3.2.	Belanja Modal Perbaikan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.000.000,00	
1.05.07.	5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah			10.000.000,00	
1.05.90.		<b>Belanja Jasa Perpanjangan (tu/Pajak Ases Desa/Pajak TAD</b>	100	Persen	15.600.000,00	PSH
1.05.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.600.000,00	
1.05.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perekamuran			15.600.000,00	
1.05.90.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan (tu/Pajak			15.600.000,00	
1.05.91.		<b>Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	100	Persen	96.275.000,00	PSH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			96.275.000,00	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			15.625.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			600.000,00	
1.05.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.05.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.325.000,00	
1.05.91	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spendak			800.000,00	
1.05.91	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.490.000,00	
1.05.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.250.000,00	
1.05.91	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			200.000,00	
1.05.91	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
1.05.91	5.2.3.00	Belanja Bantuan Transport			3.000.000,00	
1.05.91	5.2.7	Belanja Lain-lain yang Diarahkan kepada Masyarakat			78.000.000,00	
1.05.91	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			78.000.000,00	
92		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>900.795.417,00</b>	
92.01		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>20.810.000,00</b>	
2.01.01		<b>Fasilitasi PRUDTK/IPW/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Millik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	100	Persen	20.810.000,00	DDP
2.01.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			20.810.000,00	
2.01.01	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			10.060.000,00	
2.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			3.000.000,00	
2.01.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00	
2.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.610.000,00	
2.01.01	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spendak			600.000,00	
2.01.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.01.01	5.2.2.90	Belanja Jasa Pefasilitasi Pendidikan Desa			6.000.000,00	
2.01.01	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			1.300.000,00	
2.01.01	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.300.000,00	
2.01.01	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			450.000,00	
2.01.01	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.	5.2.E.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00	
2.01.01.	5.2.E.03	Belanja Pemeliharaan Perlatan			3.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			128.198.417,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Penyandu (Makanan Tambahan, Kalas Bimil, Laska, Insentif)	100	Persen	48.880.000,00	DDG
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.880.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			31.850.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			31.200.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			600.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			18.200.000,00	
2.02.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			18.200.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	100	Persen	12.730.000,00	DDG
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.730.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			5.700.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultasi/Karsumber			3.000.000,00	
2.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.600.000,00	
2.02.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.600.000,00	
2.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			420.000,00	
2.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perlatan/Perengkapan			420.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100	Persen	40.028.000,00	DDG
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.028.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAH/OUTPUT		ANGSAHAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
2.02.04	5.2.1	Belanja Barang Pertangkapan:			23.675.000,00	
2.02.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			1.300.000,00	
2.02.04	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasoli Uang Tabung Pimadam Kebakaran			1.350.000,00	
2.02.04	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.225.000,00	
2.02.04	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbi-untuk/Spanduk			500.000,00	
2.02.04	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			3.000.000,00	
2.02.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium:			7.350.000,00	
2.02.04	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.250.000,00	
2.02.04	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pejabat			4.800.000,00	
2.02.04	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas:			4.900.000,00	
2.02.04	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			4.000.000,00	
2.02.04	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			900.000,00	
2.02.04	5.2.4	Belanja Jasa Sewa:			2.400.000,00	
2.02.04	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perabotan/Pertengkapan			2.400.000,00	
2.03.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	100	Person	4.789.417,00	ACC, PDH
2.02.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa:			4.789.417,00	
2.02.06	5.2.1	Belanja Barang Pertangkapan:			4.028.417,00	
2.02.06	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Posa			894.804,00	
2.02.06	5.2.1.04	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
2.02.06	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.904.553,00	
2.02.06	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbi/Furud/Spanduk			150.000,00	
2.02.06	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium:			750.000,00	
2.02.06	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
2.02.06	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Pembaca Acara			250.000,00	
2.02.07		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Tradisional	100	Person	3.375.000,00	ODS
2.02.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa:			1.975.000,00	
2.02.07	5.2.1	Belanja Barang Pertangkapan:			1.725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.07	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
2.02.07	5.2.1.08	Belanja Benih/Umbu/untuh/Gandum			150.000,00	
2.02.07	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			250.000,00	
2.02.07	5.2.3.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
2.02.07	5.3	Belanja Modal			2.000.000,00	
2.02.07	5.3.5	Belanja Modal Lainnya			2.000.000,00	
2.02.07	5.3.5.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman			2.000.000,00	
2.02.90		Pengalangan Dana Desa	100	Persen	15.000.000,00	PDH
2.02.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
2.02.90	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			12.750.000,00	
2.02.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.750.000,00	
2.02.90	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
2.02.90	5.2.2.00	Belanja Jasa Honorarium Pejabat			1.500.000,00	
2.02.90	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			750.000,00	
2.02.90	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan			750.000,00	
02.03		Sub-Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang			226.775.000,00	
2.03.01		Pemeliharaan Jalan Desa	100	Persen	130.300.000,00	DDE, PDH
2.03.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			300.000,00	
2.03.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat			300.000,00	
2.03.01	5.2.7.02	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi tenaga kerja			300.000,00	
2.03.01	5.3	Belanja Modal			130.000.000,00	
2.03.01	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Pemeliharaan Jalan			130.000.000,00	
2.03.01	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan			1.750.000,00	
2.03.01	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			71.000.000,00	
2.03.01	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			57.000.000,00	
2.03.01	5.3.5.06	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	BATUAN		
2.03.05		Pembinaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pavlo/Drainase dll)	100	Persen	60.200.000,00	DOS. PSN
2.03.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa			200.000,00	
2.03.05	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			200.000,00	
2.03.05	5.2.7.02	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KK) bagi tenaga kerja			200.000,00	
2.03.05	5.3	Belanja Modal			60.000.000,00	
2.03.05	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			60.000.000,00	
2.03.05	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan			1.000.000,00	
2.03.05	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			28.800.000,00	
2.03.05	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			30.000.000,00	
2.03.05	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			200.000,00	
2.03.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan (Desa **)	100	Persen	10.050.000,00	DOS. PSN
2.03.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa			50.000,00	
2.03.10	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.000,00	
2.03.10	5.2.7.02	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KK) bagi tenaga kerja			50.000,00	
2.03.10	5.3	Belanja Modal			10.000.000,00	
2.03.10	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			10.000.000,00	
2.03.10	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan			300.000,00	
2.03.10	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			4.550.000,00	
2.03.10	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			5.000.000,00	
2.03.10	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			150.000,00	
2.03.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100	Persen	85.144.000,00	DOS. PSN
2.03.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa			250.000,00	
2.03.12	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			250.000,00	
2.03.12	5.2.7.02	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KK) bagi tenaga kerja			250.000,00	
2.03.12	5.3	Belanja Modal			85.144.000,00	
2.03.12	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			85.144.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.1.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelembaga Kegiatan			1.500.000,00	
2.03.12.	5.1.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			43.500.000,00	
2.03.12.	5.1.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			49.994.000,00	
2.03.12.	5.1.5.08	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			150.000,00	
2.03.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman MDD Desa/Suku Bersjarah			38.832.000,00	PSN, PSK
2.03.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			100.000,00	
2.03.16.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat			100.000,00	
2.03.16.	5.2.7.32	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KK) bagi tenaga kerja			100.000,00	
2.03.16.	5.3.	Belanja Modal			38.832.000,00	
2.03.16.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			38.832.000,00	
2.03.16.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			17.705.000,00	
2.03.16.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			21.132.000,00	
2.03.17.		Pembuatan/Pemeliharaan Peta Wilayah dan Sualat Desa**)	100		4.500.000,00	DDG
2.03.17.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.500.000,00	
2.03.17.	5.2.1.	Belanja Barang Pengalangan			2.400.000,00	
2.03.17.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.200.000,00	
2.03.17.	5.2.1.00	Belanja Sewa/Untai-untai/Sewa			150.000,00	
2.03.17.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.500.000,00	
2.03.17.	5.2.3.60	Belanja Bantuan Transportasi			2.500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kawasan Permukiman			15.000.000,00	
2.04.08.		Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Dorong-gorong, Saluran, Part (luar Perumahan Jalan))	100	Pasam	15.000.000,00	DDG, PSK
2.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.000,00	
2.04.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat			30.000,00	
2.04.05.	5.2.7.32	Belanja Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KK) bagi tenaga kerja			50.000,00	
2.04.05.	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	
2.04.05.	5.3.7.	Belanja Modal Infaq/Tribung/Donasi/Al Limbah/Pembangunan			15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DATA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.04.05.	5.3.7.02	Belanja Modal Iqas/Embung/Drainase/MI - Upah Tenaga Kerja			9.000.000,00	
2.04.05.	5.3.7.03	Belanja Modal Iqas/Embung/Drainase/MI - Bahan Baku/Material			5.800.000,00	
2.04.05.	5.3.7.04	Belanja Modal Iqas/Embung/Drainase/MI - Administrasi/Kegiatan			200.000,00	
03		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>149.345.134,00</b>	
03.02.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>44.210.134,00</b>	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Keceman, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (KUT, RI, Raya Keagamaan dll)			36.210.134,00	PEH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.210.134,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Penengkapan			600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Lambang/Spanduk			600.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.050.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pejabat			2.050.000,00	
3.02.03.	5.2.2.93	Belanja Jasa Honorarium Jari Lantia			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.600.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perlatan/Penengkapan			3.600.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diawarkan kepada Masyarakat			23.660.134,00	
3.02.03.	5.2.7.31	Belanja Hadiah Kegiatan			17.260.134,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diawarkan kepada Masyarakat Lainnya			6.400.000,00	
3.02.90.		Jasa Pengasah Mekan/Modis (Honorarium)	100	Persen	38.200.000,00	PEH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.200.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.200.000,00	
3.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pejabat			38.200.000,00	
03.03.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>10.625.000,00</b>	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	100	Persen	10.625.000,00	ODG, PEH
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.625.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Penengkapan			1.025.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.375.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spoduk			550.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Mereksundir			700.000,00	
3.03.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pejabat			200.000,00	
3.03.06.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembaca Acara			450.000,00	
3.03.06.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pelaksana / Pengambilan Sampah / Pengal			300.000,00	
3.03.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
3.03.06.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			74.250.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	100	Persen	38.175.000,00	PAD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.175.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			18.170.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.720.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spoduk			400.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Mereksundir			750.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			5.500.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			700.000,00	
3.04.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Perlatan/Perengkapan			700.000,00	
3.04.04.		Pelatihan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	100	Persen	36.075.000,00	DOS
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.075.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			31.075.000,00	
3.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
3.04.04.	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.400.000,00	
3.04.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			23.375.000,00	
3.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.000.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga M&P/Profil/Konsultan/Nonasumber			3.000.000,00	
3.04.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.000.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>28.430.000,00</b>	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>21.000.000,00</b>	
<b>4.03.01.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	100	Person	5.500.000,00	PDH
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			5.000.000,00	
<b>4.03.02.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	100	Person	10.000.000,00	PDH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			10.000.000,00	
<b>4.03.03.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	100	Person	5.500.000,00	PDH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan			1.000.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Paket Cetak/Dokumentasi/Rekad			1.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			5.000.000,00	
<b>04.06.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			<b>4.930.000,00</b>	
<b>4.06.02.</b>		<b>Pelatihan Pengefektifan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Petdes)</b>			<b>4.930.000,00</b>	ODS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.930.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan			1.890.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
4.00.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000.00	
4.00.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000.00	
4.00.02	5.2.1.08	Belanja Benda/Umbar-umbar/Sponsuk			150.000.00	
4.06.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000.00	
4.06.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profil/Konsultan/Hargapembel			1.500.000.00	
4.06.02	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000.00	
4.06.02	5.2.3.02	Belanja Bantuan Transport			1.500.000.00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			3.000.000.00	
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif			3.000.000.00	PSH
4.07.04.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000.00	
4.07.04.	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000.00	
4.07.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.000.000.00	
88		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			133.881.818.00	
08.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			18.881.818.00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	100	Persen	18.881.818.00	DDB
5.01.00.	5.4	Belanja Tidak Tertaga			18.881.818.00	
5.01.00.	5.4.1	Belanja Tidak Tertaga			18.881.818.00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Tertaga			18.881.818.00	
08.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			115.200.000.00	
5.03.00.		Penganganan Keadaan Mendesak	22	KK	115.200.000.00	DDB
5.03.00.	5.4	Belanja Tidak Tertaga			115.200.000.00	
5.03.00.	5.4.1	Belanja Tidak Tertaga			115.200.000.00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Tertaga			115.200.000.00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.009.684.727.20</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(32.444.449.20)</b>	
5.		<b>PEMBIAYAAN</b>				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	8.1.	Penerimaan Pembayaran			156.444.449,20	
	8.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			156.444.449,20	
	8.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			156.444.449,20	
	8.2.	Pengeluaran Pembayaran			194.000.000,00	
	8.2.2.	Penyertaan Modal Desa			194.000.000,00	
	8.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			194.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>32.444.449,20</b>	
		<b>SISA LEBIH(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

